

Dilema Demokrasi Elektoral

I Nyoman Wiratmaja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa
email: inyomanwiratmaja@gmail.com

ABSTRACT

The practice of democracy is not the same as its theory. People's sovereignty is often derailed by power-hungry political elites. Even though people in the Reform era are no longer expected to only play a limited role or merely as a giver or renew political legitimacy or as mere objects of political activity. It is worried because the practice of electoral democracy is felt further away from the spirit of democratic principles. There is still widespread behavior that justifies any means that is contrary to the values and principles of democracy, such as: politicization of SARA (*suku, agama, ras, antargolongan*) or politics of identity, criminalization of political opponents, dissemination of hoaxes, hate speeches, and intimidation, unneutral state apparatus, or election organizers, practices of money politics, sound auction and bribery, document forgery and manipulation of operating procedures. As a result, elected leaders often do not serve the people. All policies taken are often biased in the interests of the ruling elite or the interests of investors, and tend to be very minimal even without involving the people. In the future bad practices should not be continued and should be replaced by a shared commitment to establish substantial democracy by upholding law and justice. Stop the electoral democracy is only a lip-service of a five-year democratic party and must have a real contribution to the improvement of the nation. Electoral democracy must be an arena of healthy competition to get someone who is qualified and able to be a leader in an effort to realize common goals of just prosperity. If it fails to uphold a substantial democracy in everyday political life, then it does not only mean the castration of people's sovereignty or the failure of democracy alone, but the destruction of the Republic of Indonesia will be at stake.

Keywords: democracy, electoral, substantial.

PENDAHULUAN

Secara teori rakyat sangat dimuliakan dalam negara yang mengaku mengusung demokrasi. Pemerintahan demokratis berarti pemerintahan dijalankan atas persetujuan yang diperintah. Ditegaskan bahwa kedaulatan ada

di tangan rakyat. Segala kekuasaan penyelenggara Negara sumbernya adalah rakyat. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat. Salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat adalah dengan melaksanakan demokrasi elektoral atau pemilihan umum untuk memilih para pemimpinnya secara langsung.



Masyarakat sudah sangat biasa dengan kata demokrasi – bahkan tidak ada negara yang tidak mengklaim dirinya dengan bungkus demokrasi, banyak rezim totaliter dan diktator militer selalu berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan label demokrasi. Demokrasi adalah sebuah konsep yang indah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kedaulatan rakyat dijunjung tinggi, ditempatkan pada posisi yang paling terhormat di setiap negeri yang menganutnya. Indonesia sebagai sebuah negara yang secara tegas mengusung prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu nilai dasar demokrasi adalah menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (Mayo, 1965; Nurtjahjo, 2008: 73).

Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang dijadikan penopang kehidupan masyarakat negara untuk dapat berdiri tegak, disamping nilai kedaulatan rakyat, masih ada yang lainnya yakni: pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Demokrasi bukanlah persoalan hitam putih, melainkan masalah kadar, sehingga akan terlihat adanya pergeseran dari lebih demokratis menuju kurang

demokratis, ataupun sebaliknya. Untuk mengetahui posisi suatu rezim apakah sudah semakin demokratis atau malahan mundur menjadi kurang demokratis, dapat dilacak dari kemampuannya untuk merealisasikan nilai-nilai demokrasi yang sudah dijadikan pedoman umum negara-negara yang menganut demokrasi modern.

Demokrasi sangat dikenal oleh rakyat, namun berkaitan dengan tingkat pemahaman dan implementasinya dalam berkehidupan dan berkenegaraan sangat mungkin masih banyak yang mengetahuinya sebatas adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat, pemilihan Presiden-Wakil Presiden, maupun memilih kepala pemerintahan daerah.

Tidaklah salah pemaknaan pemilihan umum (elektoral) adalah bentuk demokrasi, tetapi demokrasi tidak hanya tentang proses pemilihan umum semata. Keyakinan yang berlebihan kepada pemilihan umum justru menjadi sebuah jebakan yang menyesatkan. Pemilihan umum hanya sebuah proses “demokrasi berkala” untuk membentuk demokrasi formal, yang dalam proses tersebut, rakyat hanya bisa memberikan dukungan dan pilihan melalui *voting*.

Masih ada salah paham bahwa pemilihan umum dianggap merupakan satu-satunya bentuk pelaksanaan proses demokrasi yang ada, bahkan disebut sebagai pesta demokrasi. Setiap orang terjangkit demam demokrasi elektoral dan menaruh harapan besar terhadap demokrasi. Proses demokrasi hanya menjadi ritual politik lima tahun sekali atau demokrasi hanya berurusan dengan pemilihan umum semata.

Padahal yang lebih substansial dari proses demokrasi adalah demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi yang terkait langsung dengan suara masyarakat serta proses pembuatan keputusan yang bakal mengikat masyarakat. Jebakan demokrasi elektoral



tersebut bisa mendatangkan kekecewaan yang luar biasa. Demokrasi elektoral bisa saja berlangsung secara demokratis, tetapi hanya berhenti pada pembentukan demokrasi formal. Setelah itu, demokrasi dalam keseharian, terutama proses pembuatan keputusan tidak lagi berlangsung secara demokratis dan sangat jauh dari kontribusi dan partisipasi rakyat (Valdy, 2012).

Dalam sistem kehidupan bernegara di dunia ini, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara pasti menginginkan suatu sistem yang terbaik sehingga seluruh elemen rakyat bisa menjadi padu. Tentang bentuk pemerintahan mana yang menjadi yang terbaik dalam menjalankan negara tidak akan pernah menjadi satu suara karena kondisi setiap negara berbeda dan tidak mungkin untuk disamakan.

Mungkin benar bahwa sebagian besar rakyat menginginkan adanya pemilihan langsung pemimpinnya. Namun demikian, benarkah akan lebih baik pemimpin yang dipilih secara langsung? Jawabannya tentulah tidak sederhana. Lebih *legitimate* atas dasar demokrasi mungkin benar, namun pemimpin yang dipilih secara demokratis kemudian menjadi diktator juga tidak jarang. Artinya rakyat juga harus menyadari bahwa memilih seseorang bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu mata rantai dari sistem pengelolaan negara.

Demokrasi sebagai Pilihan

Demokrasi sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mungkin benar demokrasi bukanlah merupakan sistem yang sempurna, sering tidak efisien, banyak kelemahan lainnya, namun keunggulannya adalah karena hanya dalam demokrasilah semua kelemahan itu dapat dilontarkan untuk menemukan jalan pemecahan yang terbaik.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara Negara sumbernya adalah rakyat. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat - pemerintah sebagai mandataris rakyat. Jadi bagaimana masyarakat dikembangkan oleh pemerintahan negara adalah hak semua anggota masyarakat untuk menentukannya. Rakyat berhak mengangkat dan mengontrol pemerintah.

Rakyat bukanlah sekadar alat legitimasi penguasa. Posisi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai obyek maupun subyek. Spirit demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” bukan hanya untuk dijadikan jargon di masa-masa pemilu semata.

Hak rakyat untuk memilih pemerintahnya melalui pemilihan umum yang periodik yang bebas dan adil diakui sebagai hak demokratis paling dasar. Perlindungan terhadap hak ini memerlukan pengakuan akan hak untuk memilih dan kebutuhan akan suatu sistem pemilihan yang inklusif, dan menghasilkan suatu perwakilan yang benar sesuai kehendak semua rakyat.

Demokrasi elektoral bukanlah sekadar proses untuk memperoleh wakil rakyat atau seseorang menjadi pemimpin, tetapi demokrasi juga lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Demokrasi tentu saja tidak hanya berarti memilih seseorang untuk menjadi, melainkan juga untuk mencapai ataupun mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan bersama.

Demokrasi elektoral adalah arena kompetisi dalam rangka memilih untuk mendapatkan seseorang yang mampu menjadi pemimpin dalam usaha mencapai ataupun mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukan hanya proses pelaksanaan demokrasinya yang penting melainkan juga kualitas orang yang akan dipilih dan juga kiprahnya untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pemimpin yang bersaing maupun yang terpilih harus mampu menyeimbangkan antara dinamika keragaman demokrasi dengan keutuhan bangsa. Identitas demokrasi yang ideal bertumpu pada “kesatuan dalam keanekaragaman” dan pergaulan mengisyaratkan adanya konsensus dan konflik (Adrain, 1992: 259).

Rakyat semestinya tidak boleh menjadi tawanan demokrasi. Harus ada upaya untuk memulai suatu dekonstruksi pemahaman tentang proses demokrasi dan tujuan yang ingin dicapai. Demokrasi adalah sarana untuk



Sumber: tintapendidikanindonesia.com

manusia atau rakyatnya dan tidak sebaliknya. Demokrasi seharusnya mampu mendorong masyarakat mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Antara Ideal dan Praktik Demokrasi

Ideal demokrasi memang lebih mudah untuk diperbincangkan dibandingkan dengan implementasinya. Adakalanya sulit menjatuhkan pilihan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan pada saat ada suatu cara yang mungkin dirasakan lebih diinginkan daripada yang lain, akan tetapi kurang demokratis. Dapatkah dalam beberapa kondisi, dapat dibenarkan untuk mempertukarkan sedikit demokrasi, demi untuk memperoleh lebih banyak tujuan-tujuan lain yang diinginkan. Artinya, sedikit berkurang kadar demokrasinya, untuk bisa mencapai lebih banyak hasil-hasil yang baik (Dahl, 1992: 325).

Menuju ke arah demokrasi adalah merupakan sebuah proses demokratisasi yang panjang, bibit-bibitnya perlu disemai, dipelihara, dipupuk dan dikembangkan, sehingga dapat menjadi dewasa dan berkembang secara mandiri. Untuk itu, sangatlah diperlukan adanya kesadaran dari berbagai komponen bangsa ini untuk selalu bersikap dan berperilaku demokratis.

Senantiasa perlu diingat bahwa demokrasi memang bukanlah sistem yang paling sempurna bahkan mudah terjerumus ke kondisi hukum rimba walaupun tetap dalam bungkus yang sama. Masyarakat diharapkan senantiasa kritis dan jeli, karena demokrasi secara prinsip adalah populis, namun prakteknya seringkali elitis.

Pemilihan umum memang sangat mungkin lebih gaduh dibandingkan dengan sistem lainnya. Kegaduhan seharusnya masih bisa dianggap positif sebagai tanda dinamisnya proses demokrasi. Asalkan sumber keributan atau kegaduhan tersebut jangan sampai kebanyakan berkutat pada politik identitas dalam bentuk pemanfaatan sentimen agama, ras, dan pruralisme semu. Atau terjerumus untuk menggunakan strategi kampanye sesat seperti intimidasi, pelabelan sosial, dan politik uang seolah diterima begitu saja tanpa melihat eksesnya untuk kehidupan sosial dan demokrasi di masa depan. Wacana kritis berkaitan dengan kepentingan publik yang mestinya mewarnai perdebatan

kampanye malah tenggelam akibat tajamnya persaingan untuk menggaet suara dengan menghalalkan segala cara (Basuki, 2017).

Sejak reformasi bergulir, Indonesia dilanda demam demokrasi elektoral, artinya semangat demokrasi mengeras meski demokrasi diartikan sebagai sebatas pemilu. Pemaknaan yang tumbuh dalam masyarakat tampak meleset dari pemaknaan demokrasi yang sebenarnya. Keyakinan yang berlebihan kepada pemilihan umum justru menjadi sebuah jebakan yang menyesatkan. Pemilihan umum hanya sebuah proses “demokrasi berkala” untuk membentuk demokrasi formal. Rakyat hanya bisa memberikan dukungan dan pilihan melalui voting. Padahal yang lebih substansial dari proses demokrasi adalah demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi yang terkait langsung dengan suara masyarakat serta proses pembuatan keputusan yang bakal mengikat masyarakat. Jebakan demokrasi elektoral tersebut bisa mendatangkan kekecewaan yang luar biasa. Menurut Valdy (2012), demokrasi elektoral bisa saja berlangsung secara demokratis, tetapi hanya berhenti pada pembentukan demokrasi formal. Setelah itu, demokrasi dalam keseharian, terutama proses pembuatan keputusan tidak lagi berlangsung secara demokratis dan sangat jauh dari kontribusi dan partisipasi rakyat.

Potensi Terjebak Post-demokrasi

Demokrasi memang tidak memberikan kepada rakyatnya pemerintahan yang paling cakap, melainkan lebih tepatnya menghasilkan apa yang kerap kali tak dapat diciptakan oleh pemerintahan-pemerintahan yang paling cakap, yaitu: kegiatan yang meluas ke mana-mana dan tiada henti-hentinya, suatu kekuatan yang melimpah ruah, dan suatu energi yang tak terpisahkan daripadanya, dan boleh jadi, betapapun buruknya keadaan, tetap dapat dihasilkan keajaiban-keajaiban. Inilah keunggulan-keunggulan sejati sebuah demokrasi (Revitch & Thernstrom, 2005: 186).

Ada dua wajah demokrasi, yaitu demokrasi sebagai realitas kehidupan sosial sehari-hari dan demokrasi sebagaimana ia direpresentasikan sebagai citra (*image*) di dalam pelbagai media informasi. Di satu pihak, ada realitas demokrasi, di pihak lain, ada citra demokrasi (*image of democracy*). Ketika

realitas demokrasi berjalan secara mutual dengan citra demokrasi, maka terbentuk semacam demokrasi sempurna. Ketika citra demokrasi tidak sesuai dengan realitas demokrasi, terbentuk demokrasi tidak sempurna. Akan tetapi, ketika citra demokrasi telah terputus sama sekali dengan realitas demokrasi yang sesungguhnya, maka yang terbentuk adalah post-demokrasi (*post-democracy*), yaitu demokrasi yang melampaui atau yang berlangsung hanya pada tingkat citra, akan tetapi telah terputus dari dunia realitas atau terputus dari prinsip demokrasi itu sendiri (Piliang, 2010: 165).

Post-demokrasi sebagai kondisi tumpang tindihnya prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip lain, seperti anarkisme dan kebebasan mutlak, baik pada tingkat citra maupun tingkat realitas. Post-demokrasi adalah sebuah kondisi, yang di dalamnya prinsip-prinsip yang membangun konsep demokrasi itu sendiri, seperti kebebasan (bersuara, berkumpul, berserikat), hak azasi manusia, persamaan, pluralism berkembang dalam praktiknya ke arah ekstrem, sehingga melampaui prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kebebasan misalnya berkembang ke arah relativisme, hak azasi manusia berkembang ke arah apa pun boleh (anarkisme). Post-demokrasi berkembang ketika prinsip demokrasi telah dicemari oleh prinsip dan praktik-praktik lain yang tidak demokratis (Piliang, 2010: 166).

Demokrasi menjadi sebuah simulacrum demokrasi (*simulacrum of democracy*), yaitu demokrasi yang menampilkan dirinya pada tingkat citra seakan-akan sebagai kopi (*copy*) atau icon (*icon*) demokrasi, padahal citra itu merupakan deviasi, distorsi, bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya.

Seseorang, atau sebuah Negara, dilukiskan lewat citraan-citraan yang ditampilkan secara sistematis – lewat media cetak, televisi, film, internet – sebagai yang super demokratis, akan tetapi citra itu pada kenyataannya



hanya topeng saja dari sifat yang sesungguhnya (Piliang, 2010: 166).

Politik Identitas dan Sentimen Primordial

Era reformasi ternyata tidak menjadikan kesadaran akan pluralism semakin baik. Pluralisme justru digiring ke arah relativisme radikal, yang di dalamnya setiap orang, kelompok, atau komunitas tampaknya bebas melakukan apa saja, tanpa perlu terikat lagi dengan konsensus, aturan main bersama, dan hukum. Segala hal kini membiak dalam wajahnya yang buruk: ketidakpastian hukum, premanisme, korupsi tanpa malu, kekerasan tanpa belas kasih, kejahatan tanpa kendali, hukum rimba, dan anarkisme. Ketimbang memperkokoh, reformasi justru merupakan titik balik – bahkan titik kematian pluralisme. Kematian pluralisme tidak lain disebabkan oleh kecenderungan perkembangan sosial politik ke arah berbagai bentuk relativisme radikal, yang di dalamnya ada kecenderungan untuk merelatifkan segala hal, sehingga menimbulkan indeterminasi di dalam berbagai aspek sosial politik. Di dalam relativisme radikal itu, batas-batas tentang konsep benar/salah, baik/buruk, moral/amoral, etis/tidak etis, indah/tidak indah, di dalam berbagai realitas kehidupan menjadi dikaburkan dan direlatifkan (Piliang, 2005: 343).

Relativisme radikal juga berimbas dalam proses demokrasi elektoral. Sosok terpilih dalam demokrasi elektoral, dalam konteks ini, merupakan para pembajak demokrasi untuk tujuan-tujuan kekuasaannya. Populisme politik terkait dengan bagaimana para kandidat dalam kontestasi demokrasi elektoral memainkan isu-isu kerakyatan (populis), bahkan secara ekstrem isu-isunya 'menyerempet bahaya' (*vivere pericoloso*), yakni dengan mengeksplorasi secara demonstratif aneka sentimen primordial (Alfian, 2016).

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang diuntungkan dengan maraknya politik identitas, seperti anti-imigran dan anti-Islam menjadi penanda mundurnya kualitas politik elektoral di tingkat global. Slogan Trump "*Make America Great Again*" menjadi *rallying cause* (penyebab pengumpulan) berbagai kelompok anti-imigran dan anti-Islam di Amerika. "*Trumpisme*" akan mendapatkan entri kamusnya sendiri berupa campuran

populisme, nativisme, dan *xenofobia* yang tidak menyenangkan namun sering berhasil secara politis (Sulistyo, 2018).

Strategi memanfaatkan maraknya politik identitas dan ujaran kebencian menjadi jalan mudah dan murah untuk menang dalam kompetisi elektoral. Mencegahnya tentu tidak mudah. Kunci utamanya adalah penegakan hukum tanpa hitung-hitungan politik. Karena upaya menghasilkan pemilu yang jujur tidak cukup dengan imbauan moral. Harus diperkuat koridor hukum yang jelas dan tegas agar bisa diminimalisasikan dampak merusaknya bagi sistem demokrasi (Sulistyo, 2018).

Dalam konteks elektoral di Indonesia versi Economic Intelligent Unit (EIU), demokrasi Indonesia memang belum matang. Memang sudah dalam jalur yang benar dalam pemilihan langsung. Tapi soal keterbukaan, menerima kekalahan, netralitas aparat, masih kurang. Secara kultur, memang ada kecenderungan masih terikat lebih kuat ke aspek-aspek primordial (Seftono, 2018).

Populisme politik telah dipandang sebagai bukan sekadar penyakit kambuhan, melainkan juga ancaman serius bagi demokrasi. Dalam kadarnya yang rendah, populisme mengusik upaya peningkatan kualitas demokrasi. Apabila kadarnya tinggi, ia jelas-jelas merusak hakikat demokrasi (Alfian, 2016).

Masih jelas terlihat terjadinya keterjebakan pemimpin dan juga masyarakat luas ke dalam pola budaya, sehingga bukan hanya muncul pemimpin yang semata-mata hanya memikirkan warganya atau kelompoknya belaka, juga dibarengi oleh sikap masyarakat yang sangat sulit menerima ataupun percaya, apalagi memberikan kesempatan kepada orang (pemimpin) yang bukan berasal dari kalangannya sendiri. Singkatnya terjebak politik anak-anak. Masih terkungkung budaya paternalistik yang berakibat sulit munculnya kemandirian melakukan pilihan dan sekaligus sulit menerima kekalahan yang terhormat sekalipun.

Demokrasi yang Dibajak Pemilik Modal dan Feodalisme Baru

Ongkos demokrasi elektoral sangat tinggi akibat politik yang tidak berbasis kinerja, melainkan hanya berupa transaksi menjelang pemilu.

Konsekuensinya, politikus dan partai politik harus bergerilya, bahkan kerap menjadi “drakula” untuk menghisap banyak sumber finansial, agar bisa bertahan di medan pertempuran yang panjang dan melelahkan (Heryanto, 2011).

Habibi (2018) mensinyalir bahwa jual beli suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, mendelegitimasi dan mendistorsi proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara politikus dan pemilih, melemahkan sistem kepartaian, dan menghadirkan politikus korup. Pandangan umum menilai relasi antara pemilih dan partai maupun kandidat bukan atas dasar pertimbangan “rasional” terhadap kebijakan, akan tetapi karena pemilih membuat keputusan atau pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang.

Ketika uang menjadi bahasa politik, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan atau dalam keserakahan orang kaya baru, kemampuan demokrasi elektoral lekas ambruk. Suara bisa dibeli dan dimanipulasi. Idealisme pemilih dirobokkan, otoritas Komisi Pemilihan Umum dihancurkan. Ketika nilai-nilai idealisme kewargaan tidak memiliki saluran efektif, nilai-nilai kepentingan investor mendikte kebijakan politik (Latif, 2010).

Dasar kemerdekaan dan persamaan dari demokrasi mempunyai konsekuensi adanya keharusan persaingan bebas di bidang ekonomi. Oleh karena tidak adanya kemampuan yang sama di antara mereka yang menjalankan persaingan bebas itu, timbul perbedaan yang besar antara golongan *the haves dan golongan the have not*. Di dalam praktek ketatanegaraan golongan kedua ini tidak dapat ikut menentukan urusan ketatanegaraan. Kenyataan di atas disebabkan lemahnya kedudukan golongan *the have not*, di samping itu adalah merupakan kenyataan pula, bahwa lembaga perwakilan rakyat dikuasai oleh golongan *the have* (Goesniadhie S., 2009).

Menurut Baswedan (2011a) politik uang selalu terdengar dalam setiap Pemilu, tetapi pelaku sulit ditangkap. Dalam berpolitik, momentum paling mahal adalah saat kampanye. Kampanye harus diaudit dalam sisi pengeluarannya. Diperlukan aturan untuk menetapkan batasan biaya maksimal bagi seseorang untuk memperebutkan jabatan politik tertentu. Misalnya untuk menjadi bupati,

biaya maksimal kampanye dibatasi Rp. 5 miliar. Dengan begitu, peluang kubu yang kaya raya tidak jauh berbeda dengan peluang pihak lain yang memiliki kekuatan finansial biasa-biasa saja. Itu bisa menekan otoritas kekuatan uang dalam politik. Kalau tidak ada regulasi seperti itu, selamanya arus politik akan ditentukan pemilik uang. Padahal, “si kaya bukan penentu republik ini”.

Dominasi demokrasi elektoral (*elektoral democracy*) yang kapitalistik dalam sistem politik Indonesia ini, ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antarpartai politik memperebutkan pemilih melalui basis transaksional, mengubah pemilu menjadi seperti pasar, tempat jual beli suara mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Dan tentu itu harus dengan biaya yang tak murah. Kepemimpinan transaksional hanya berdasar pertukaran kepentingan ekonomi-politik itu jelas gagal jika harus menterjemahkan kehendak rakyat. (Sidarta, 2018)



Sumber: beritatransparansi.com

Dwipayana (2011) menyatakan bahwa kehidupan di arena lapangan politik semakin mencemaskan. Bukan hanya karena politik transaksional kian menguat, tetapi juga sebab kehadiran kembali karakter feodalisme baru dalam ranah politik nasional ataupun lokal. Adalah Harry J. Benda (1964) yang datang dengan keyakinan kuat

bahwa republik ini tidak akan pernah beranjak menjadi negara demokratis karena kultur politik yang dibangun para elitnya semata-mata melanjutkan tradisi politik feodal yang diwarisi dari masa lalu (kerajaan). Singkatnya, Benda mengatakan bahwa kelembagaan demokrasi adalah interupsi artifisial terhadap watak dasar politik yang tak berubah sejak dahulu kala.

Akhirnya kehadiran gejala feodalisme baru dalam politik Indonesia mutakhir mengingatkan kita akan pentingnya melihat kembali proses demokratisasi: tidak semata-mata instalasi prosedur-kelembagaan demokrasi, melainkan sebagai upaya mengukuhkan kembali kultur demokratis. Itu artinya, proses demokratisasi harus memungkinkan transformasi dari kultur “kawula” atau klien menjadi kultur warga negara (Dwipayana, 2011).

Asyik dalam Arena Merebut atau Mempertahankan Kekuasaan

Bagi yang sedang berkuasa seringkali terlenta hanya melakukan berbagai kegiatan untuk sekadar mempertahankan kekuasaan. Sehingga hasil pemilihan pemimpin secara langsung bukanlah secara otomatis akan berarti pemimpin terpilih akan mampu menuntaskan segala persoalan dan pasti mampu meraih tujuan yang dicita-citakan. Akibatnya, masyarakat akan semakin menjadi-jadi kecewanya dan muak karena hampir setiap saat disuguhi adegan manipulasi aspirasi rakyat. Benar-benar antara program partai, kemauan elitnya serta kadernya sangat-sangat tidak nyambung dengan aspirasi rakyat. Seperti sering terjadi, saat penguasa berganti, keadaan para warga negara tetap begitu-begitu saja. Kelompok yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Penguasa selalu lebih memilih berkolaborasi dengan pengusaha, maupun alat penyelenggara Negara lainnya.

Banyak cara yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan termasuk strategi komunikasi politik yang dijalankan. Di dalam sebuah relasi komunikasi yang sepiantas tampak terbuka, adil, dan demokratis, sesungguhnya ada sebuah pemaksaan yang sangat halus, sedemikian rupa halusya sehingga pihak-pihak yang dipaksa tidak merasakannya sebagai sebuah pemaksaan. Dalam hubungan semacam ini, bahasa, symbol, dan media pada kenyataannya tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat komunikasi, akan tetapi sekaligus sebagai alat kekuasaan, khususnya alat dominasi kekuasaan lewat kekerasan. Artinya, orang (yang berkuasa) tidak hanya ingin didengar dan dimengerti, tetapi juga ingin dipercayai, dipatuhi, dihargai, dan diikuti oleh orang-orang yang dikuasai dengan menerapkan cara-cara pemaksaan yang sangat halus. Untuk itu, mereka memaksakan berbagai simbol dan interpretasi

atas simbol-simbol tersebut, meskipun melalui pemaksaan yang halus, yaitu lewat mekanisme kekuasaan dan otoritas untuk berbicara yang dimilikinya dalam rangka untuk meredam berbagai opini atau makna-makna lain yang dianggap mengancam kekuasaan dan otoritas tersebut (Piliang, 2005: 324).

Untuk yang belum memiliki kekuasaan akan selalu berusaha untuk merebutnya dengan segala upaya. Serunya kompetisi dan panasnya hubungan antarkandidat menjelang pemilu adalah salah satu ekstrim buruk demokrasi elektoral. Penekanan pada aspek kontestasi sering melahirkan konsekuensi kontraproduktif jika kontestasi elektoral tak disikapi secara matang. Matang di sini mengacu mentalitas demokratik ideal, di mana tiap manusia politik memandang lawan sebagai "aku yang lain", keberadaannya adalah keniscayaan yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi (Mouffe, 2000). Lawan bukan musuh yang harus ditiadakan, tetapi *friendly enemy* yang niscaya, setara, dan dihargai proporsional. Karena tanpa lawan, pertarungan demokratik tak dimungkinkan berlangsung (Hargens, 2008).

Hasil pertarungan hanya akan mendapatkan para penguasa yang banyak diisi orang-orang baru maupun orang lama yang tetap berusaha melanggengkan dinasti politik mereka baik di pusat maupun di daerah. Demokrasi Indonesia sepertinya masih sulit untuk beranjak dari fase transisi. Konsolidasi politik dan segala kegaduhan selama ini seperti memang tak pernah ingin berangkat menuju demokrasi substansial. Indonesia seperti hanya berputar-putar dalam demokrasi elektoral kapitalistik, yang dirayakan sejak Orde Baru yang diktatorial itu ditumbangkan anak-anak muda yang keluar sejenak dari bangku kuliahnya (Sidarta, 2018).

Suara Rakyat yang Ditenggelamkan Suara Partai

Saat ini partai politik tidak dipandang sebagai institusi artikulasi pendapat rakyat. Karenanya rakyat sering kecewa. Partai politik masih memfasilitasi aktivis partai tetapi tidak memfasilitasi aspirasi rakyat. Partai politik itu pun tidak mencerminkan aspirasi masyarakat tetapi mencerminkan aspirasi rezim.

Menurut Baswedan, (2011) kedekatan rakyat pemilih dengan partai bukan karena *policy* dan langkah yang akan dilakukan oleh partai, tapi karena identitas dan “bendera” yang diusung partai. Dampaknya, kita sulit memilih partai berdasarkan *issue* seperti jika kita menginginkan sebuah perekonomian Indonesia yang independen dan nasionalistik, kita kesulitan mencari partai. Partai masih menjadi cermin identitas ideologi politik, belum menjadi cermin identitas ideologi kebijakan. Dengan kata lain partai belum menjadi *vehicle* untuk implementasi ideologi politik dalam bentuk *policy* (kebijakan). Itulah tantangan terbesar partai politik di Indonesia.

Demokrasi mensyaratkan partai politik untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (*policy*). Yang dibutuhkan dari *output* demokrasi adalah *policy* yang menguntungkan rakyat. Agar rakyat merasa diuntungkan dengan proses politik yang bebas, transparan, dan terbuka. Kalau *output*-nya tidak menguntungkan rakyat, timbul pertanyaan untuk apa ada demokrasi? (Baswedan, 2011).

Kepentingan yang Bermuara Pro-Rakyat

Semakin heterogen suatu masyarakat atau komunitas dan semakin banyak jumlah rakyat yang harus dilayani, semakin sulit bagi pemerintah memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, semakin besar pula kemungkinan timbulnya kekecewaan rakyat terhadap pemerintah. Ini bisa menjadi sumber utama bagi munculnya disintegrasi bangsa-bangsa. Di satu sisi, pluralism mengandung dilema ketika terbukanya kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat yang bisa menjadi pendorong atau bahkan mengganggu stabilitas suatu pemerintahan Negara. Di sinilah pentingnya manajemen pengelolaan perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat (Abdilah S., 2002: 124-125).



Karena sudah menjadi pilihan dan menerima demokrasi elektoral sebagai realitas sosial, walaupun masih dalam batas pemahaman yang sangat minimal. Maka, demokrasi elektoral ini harus diperluas atau harus didemokratisasikan, yang sering disebut dengan istilah radikalisasi demokrasi. Para ilmuwan sosial menyebutnya sebagai model *semi-direct democracy* atau *participatory democracy*. Maksudnya, adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk terlibat sepenuhnya dalam merencanakan, memutuskan, dan mengontrol kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang menyangkut hajat hidupnya dalam bingkai demokrasi elektoral (Pontoh, 2006).

Masyarakat juga harus semakin menyadari dan untuk tidak lagi melihat politisi itu orang harus bebas kepentingan. Realitanya semua pasti punya kepentingan dan masyarakat politik harus realistis. Individu mempunyai kepentingan, partai juga, maka harus membuat kepentingan para politisi bisa diartikulasikan, bisa diungkapkan dan melihatnya sebagai suatu yang wajar. Tapi untuk mereka mendapatkan semuanya itu harus menguntungkan publik (Baswedan, 2011b).

Kalau dalam konteks menyejahterakan, harus dibayangkan adanya sebuah perwakilan rakyat atau pemerintahan, yang benar-benar mau memikirkan rakyat. Demokrasi dibuat untuk menampung berbagai kepentingan tetapi demokrasi juga harus menciptakan kepastian dan pemerintahan yang kuat sehingga bisa memerintah. Kalau demokrasi tidak menampung banyak kepentingan, perlindungannya penuh ketidakpastian, dan pemerintahnya lemah, maka komplitlah syarat untuk runtuhnya demokrasi (Baswedan, 2011b).

Heryanto (2011) menyatakan bahwa sampai saat ini energi bangsa lebih banyak tersedot ke dalam rivalitas perebutan kekuasaan dan sirkulasi jabatan, tetapi lupa bagaimana mengoptimalkan kekuasaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat. Proses elektoral kali ini belum memberi harapan besar bagi masyarakat. Selama ini proses politik tidak memberi perubahan signifikan guna meningkatkan kualitas hidup rakyat dan juga sosok para kandidat yang tidak begitu luar biasa dalam hal kepemimpinan (Hargens, 2008). Kegagalan kepemimpinan nasional untuk memperbaiki kinerja demokrasi dapat mengarah pada proses delegitimasi demokrasi, termasuk delegitimasi kepemimpinan

nasional yang dipilih melalui prosedur demokrasi. Inilah ujian sejarah, apakah kita bergerak maju atau surut ke belakang (Latif, 2010).

Langkah ke Depan

Menurut Pratikno (2008), praktek demokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada soal elektoralisme. Ilmu politik mengenal adanya demokrasi substansial, yang berarti tidak sekadar pemenuhan hak-hak sipil (*civil right*) sekaligus adanya *effective governance*.

Proses pemilu yang baik saja tidak cukup, hasil pemilunya juga harus baik. Kalau hasilnya juga baik, maka tujuan diadakannya pemilu yaitu tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera akan dapat dicapai. Walaupun realitasnya memang tidak semua pemimpin yang dipilih secara langsung dapat menunjukkan akuntabilitas dan responsif pada permasalahan rakyat. Namun secara *procedural system* pemilihan langsung akan lebih baik dibandingkan sistem pilihan tidak langsung (*indirect elected*).

Harus dihentikan cara pandang terhadap demokrasi elektoral hanya sekadar mekanisme untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Termasuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi. Ke depan demokrasi elektoral mesti menjadi tonggak awal untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih substantif.

Ke depan harus dibangun proses politik elektoral yang bersih sebagai instrumen yang efektif bagi warga untuk melakukan koreksi dan mendorong perubahan atas kebijakan atau keputusan politik yang dinilai salah. Politik elektoral harus memberikan kesempatan kepada warga pemilih (*citizen voters*) untuk menagih akuntabilitas dari para wakil dan pemimpinnya, dan juga peluang untuk memperkokoh pelebagaan demokrasi di masa depan.

Perhelatan politik elektoral harus menjadi instrumen yang efektif bagi demokratisasi yang penuh dengan integritas dalam proses dan pengelolaannya. Hentikan politik elektoral yang hanya akan berfungsi sebagai *gincu* demokrasi, sekadar rutinitas kosong karena tidak akan mampu membuat

warga pemilih menjadi berdaulat atas proses yang mereka jalani (Triwibowo, 2018).

Latif, (2010) mengingatkan demokrasi elektoral jangan lagi dipraktikkan lewat jalan pintas gebyar pencitraan, tanpa komitmen pada prinsip-prinsip efisiensi, rasionalitas kebijakan dalam realitas sosial-budaya, penegakan hukum dan keadilan, ibarat membangun istana pasir. Kelihatan indah penuh puja-puji, tetapi mudah ambruk diterjang gelombang tekanan hidup.

Untuk menghindari kegagalan dalam membangun demokrasi elektoral yang lebih substansial, maka harus dihentikan atau jangan sampai terulang praktik-pratik yang busuk seperti: terjadinya politisasi SARA, kriminalisasi lawan politik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan intimidasi, tidak netralnya aparaturnegara (Polisi, TNI, ASN, PNS, Intelijen) maupun penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), praktik politik uang dan penyyuapan, pemalsuan dokumen dan manipulasi prosedur penyelenggaraan pilkada, pilpres dan pileg, serta tindakan tidak terpuji lainnya.

Seluruh komponen pengusung demokrasi mesti berkomitmen dan ada kesungguhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Demokrasi tidak akan *survive* apabila aturan main yang ada hanya menguntungkan elit dan mengabaikan keadilan. Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga penegak hukum harus tegas dan adil, karenap enataan efektif masyarakat adalah penataan yang *de facto*, dalam kenyataan, menentukan kelakuan masyarakat (Suseno, 1991: 21). Demokrasi dan hukum memang tidak dapat dipisahkan.

PENUTUP

Demokrasi elektoral sudah jadi pilihan. Keyakinan yang berlebihan kepada pemilihan umum justru dapat menjadi sebuah jebakan yang menyesatkan. Pemilihan umum hanya sebuah proses berkala untuk

membentuk demokrasi formal yang melibatkan rakyat melalui *voting*. Proses demokrasi hanya menjadi pesta atau ritual politik lima tahun sekali. Padahal yang lebih substansial adalah demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi yang terkait langsung dengan suara masyarakat serta proses pembuatan keputusan yang bakal mengikat masyarakat.

Masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan demokrasi elektoral yang dapat menurunkan kualitas hasil yang dicapai. Demokrasi elektoral baru sekadar mekanisme untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Termasuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi, seperti: politisasi SARA atau politik identitas, kriminalisasi lawan politik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan intimidasi, tidak netralnya aparatur negara (Polisi, TNI, ASN, PNS, Intelijen) maupun penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), praktik politik uang dan penyyuapan, pemalsuan dokumen dan manipulasi prosedur penyelenggaraan.

Salah satu sumbatan nyata proses konsolidasi dan pelembagaan politik adalah dominannya demokrasi elektoral (*elektoral democracy*) yang kapitalistik. Pemilu menjadi pasar lelang suara, terlihat jelas dari kompetisi antarpartai politik ataupun kandidat dalam memperebutkan suara pemilih melalui basis transaksional. Energi bangsa ini lebih banyak tersedot ke dalam rivalitas perebutan kekuasaan dan sirkulasi jabatan, tetapi sering alpa untuk mengoptimalkan kekuasaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat.

Ke depan demokrasi elektoral harus memiliki sumbangsih nyata bagi perbaikan bangsa. Proses politik elektoral yang bersih dapat menjadi instrumen yang efektif bagi warga untuk melakukan koreksi dan mendorong perubahan atas kebijakan atau keputusan politik yang dinilai salah dan belum memihak rakyat. Jangan lagi sekadar *casing* semata yang berwujud pesta demokrasi lima tahunan yang miskin perubahan. Demokrasi elektoral harus menjadi arena kompetisi dalam rangka memilih untuk mendapatkan seseorang yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin dalam usaha mencapai ataupun mewujudkan cita-cita bersama mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Praktik buruk jangan diteruskan, ganti dengan komitmen bersama tegakkan demokrasi substansial dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Gagal menegakkan demokrasi dalam kehidupan politik sehari-hari, maka bukan hanya berarti pengebirian kedaulatan rakyat ataupun gagalnya pdemokrasi semata, melainkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi taruhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S., Ubed. 2002. *“Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas”*, Magelang, Indonesia Tera.
- Adrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana.
- Alfian, M. Alfian. 2016. *Labirin Demokrasi Populis*. Diunduh pada hari Sabtu, 19 November 2016, dari <https://www.mediaindonesia.com/news/read/78122/labirin-demokrasi-populis/2016-11-19>.
- Basuki, Bramantya. 2018. *Problem Wacana Kritis dalam Demokrasi Elektoral*. Diunduh pada 5 Juni 2018 dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/problem-wacana-kritis-dalam-demokrasi-elektoral/>.
- Baswedan, Anies Rasyid. 2011. *Partai politik Gagal Menerjemahkan Ideologinya Kedalam Bentuk Policy*. Diunduh pada 12 September 2011, dari <https://dewandaerah.wordpress.com/2011/09/12/partai-politik-gagal-menerjemahkan-ideologinya-kedalam-bentuk-policy/>.
- Baswedan, Anies, 2011a. *Politik Indonesia Sudah Liberal*. Sumber: www.isi.or.id Diunduh pada 16 September 2011, dari <https://dewandaerah.wordpress.com/2011/09/16/politik-indonesia-sudah-liberal/>.
- Baswedan, Anies. 2011b. *Aturan Demokrasi yang Pro Rakyat*. sumber: www.perspektifbaru.com, Edisi 616, 7 Januari 2008. Diunduh pada 21 September 2011, dari <https://dewandaerah.wordpress.com/2011/09/21/aturan-demokrasi-yang-pro-rakyat/>.
- Budiarjo, Miriam. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A., 1992, terjemahan A Rahman Zainuddin, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dwipayana , AA GN Ari. 2011. *Neofeodalisasi Demokrasi*. Diunduh pada 7 September 2011, dari <https://cetak.kompas.com/read/2011/01/19/04072848/neofeodalisasi.demokrasi>.

- Goesniadhie S., Kusnu. 2009. *Demokrasi Dalam Perkembangan Praktek Ketatanegaraan*. 11 Juli 2009. <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/demokrasi-dalam-perkembangan>.
- Habibi, Muhammad. 2018. *Peran Uang dalam Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral di Indonesia*. <https://zenodo.org/record/1256963#.WzhwMTnqHIU>.
- Hargens, Boni. 2008. *Kompleks Demokrasi Elektoral*. Selasa, 23 Desember 2008. <http://jakarta45.wordpress.com/2008/12/23/kompleks-demokrasi-elektoral/>.
- Heryanto, Gun Gun. 2011. *Beban Demokrasi Elektoral*. <https://dewandaerah.wordpress.com/2011/09/04/256/>.
- Heryanto, Gun Gun. 2011. *Quo Vadis Reformasi ?* Sinar Harapan, 23 Mei 2011. Diunduh pada 9 September 2011, dari <https://dewandaerah.wordpress.com/2011/09/09/quo-vadis-reformasi/> dan <https://www.sinarharapan.co.id/content/read/quo-vadis-reformasi/>.
- Latif, Yudi. 2010. *Korupsi Demokrasi*. 4 Februari 2010. <https://yudilatif.wordpress.com/2010/02/04/korupsi-demokrasi/>.
- Mayo, Henry B. 1965. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Nurtjahjo, Hendra. 2008. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Piliang, Yasraf A. 2005. *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf A. 2010. *Post-Realitas Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf A. 2011. *Dunia yang Dilipat Tamasya melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Pontoh, Coen Husain. 2006. *Radikalisasi Demokrasi*. Juni 15, 2006. <http://coenpontoh.wordpress.com/2006/06/15/radikalisasi-demokrasi/>.
- Pratikno. 2008. *Demokrasi Tidak Sebatas Elektoral Sistem*. 27 Februari 2008 <http://ugm.ac.id/id/berita/177-demokrasi.tidak.sebatas.elektoral.sistem>.
- Revitch, Diane & Thernstrom, Abigail (ed). 2005. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Seftono, Cahyo. 2018. *Ini Beberapa Kekurangan Demokrasi di Indonesia*. Diunduh pada 20 Mei 2018 dari <https://jateng.tribunnews.com/2018/01/29/ini-beberapa-kekurangan-demokrasi-di-indonesia>.
- Sidarta, Didit. 2018. *Demokrasi Elektoral, 20 Tahun Kemudian*. <https://www.kaskus.co.id/thread/5a9cd85f54c07a01238b4568/demokrasi-elektoral-20-tahun-kemudian/>.

- Sulistyo, Eko. 2018. *Politik Elektoral tanpa Ujaran Kebencian*. 8 Maret 2018. <http://ksp.go.id/politik-elektoral-tanpa-ujaran-kebencian/index.html>.
- Suseno, Franz Magnis. 1986. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Triwibowo, Darmawan. 2018. *Politik Elektoral Harus Bersih agar tak Jadi Gincu Demokrasi*. Maret 26, 2018. <https://www.tifafoundation.org/politik-elektoral-harus-bersih-agar-tak-jadi-gincu-demokrasi/>.
- Valdy, Dimas. 2012. *Demokrasi tanpa Demokrat*. 2 Juli 2012. <https://thepeacenow.wordpress.com/2012/07/02/demokrasi-tanpa-demokrat/>.